

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
BERDASARKAN UU NO. 1 PNPS DAN PASAL I56a KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Oleh :  
I NYOMAN TIKA  
201520252018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan  
Agama Berdasarkan UU No. 1 PNPS dan Pasal  
156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : I Nyoman Tika

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252018

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



NIDN : 0311026802

NIDN : 0319046403

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan  
Agama Berdasarkan UU No. 1 PNPS dan Pasal  
156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : I Nyoman Tika

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252018

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : Mei 2018

Bekasi, 8 Mei 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH  
NIDN : 0323035802

Penguji II : Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH, MM  
NIDN : 0323015604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



DR. Dwi Atmoko, SH., MH  
NIDN : 0316077604

Dekan Fakultas Hukum



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIDN : 0319046403

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan UU No. 1 PNPS dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan,



*Nyoman Tika*

201520252018



## ABSTRAK

**I NyomanTika. 201520252018.** Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan UU No. 1 PNPS dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penodaan agama berdasarkan uu no. 1 pnps dan pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dan yuridis empiris dengan karakteristik dekstriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder dan tertier dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan meneliti. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif artinya ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penodaan agama di Indonesia yang diduga dilakukan seseorang atau kelompok dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku penodaan agama apabila melanggar dari Kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas daripada itu seseorang atau kelompok keagamaan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila seseorang atau kelompok keagamaan hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaanya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dimuka umum. Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama tersebut yaitu selain dengan menggunakan aturan dasar UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 156a, upaya lain yang dilakukan juga dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Pertanggungjawaban kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan denganbaik, meskipun dengan cara cara yang masih dilakukan dengan mediasi. Namun ada juga yang belum bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut sehingga masih terjadi isu-isu negative atau bahkan permusuhan diantara masyarakat akibat penodaan tersebut. Sehingga penulis menyarankan agar ada sosialisasi kembali yang berngsur-angsur terhadap masyarakat tentang peraturan atau surat edaran Kapolri tersebut guna mencegah atau meminimalisir tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

Kata kunci :tindak pidana, penodaan agama

## ABSTRACT

I Nyoman Tika. 201520252018. Juridical Review of Crime of Desecration of Religion Based on UU No. 1 PNPS and The Criminal Code Article 156a.

The study of juridical review of the criminal act of desecration in the penal law in Indonesia aims to know and explain the legal liability of the accountability of the crime of desecration in Indonesia and on the efforts made to overcome the blasphemy of religion in Indonesia. The method used is law juridical study normative and juridical empirical with descriptive characteristics that originate in primary data and secondary data. Secondary data includes primary law material while secondary and tertiary legal materials are collected by library study. Primary data obtained by interview and research. Data arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively means interpreted and discussed based on theories (doctrine) and the principles and rules of law relating to the subject matter. The results of this study indicate the accountability of the criminal act of blasphemy in Indonesia that allegedly committed by a person or group can be accounted as a perpetrator of religious denunciation in violation of the Decree of Joint Ministerial Decree (Article 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo Law No. 5 Year 1969). But irrespective of that, a person or a religious group could not be held accountable as a perpetrator of religious blasphemy if a person or denomination only believes in and exercises his or her beliefs individually without any activity of telling, advocating or seeking public support, interpreting religion or doing religious activities held in Indonesia in public. While Efforts are made to overcome the defamation of religion that is in addition to using the basic rules of Law. 1 PNPS of 1965 and the Criminal Code Article 156a, other efforts made also with the Circular Letter of Chief of Police Number SE / 06 / X / 2015 on the handling of hate speech. The accountability of the criminal defamation case in Indonesia has actually been well implemented, albeit in a way that is still done by mediation. But there are also those who have not been able to account for the crime so that there are still issues of negative issues or even hostility among the community due to the desecration. So the authors suggest that there is a re-socialization of the community about the regulation or circular of the Chief of Police to prevent or minimize the criminal act of blasphemy in Indonesia.

Keywords: criminal offense, religious defamation

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat serta petunjuk-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan Tesis merupakan menyelesaikan salah satu syarat kelulusan dalam mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum. Dalam penulisan Tesis ini penulis memilih judul :“**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA BERDASARKAN UU NO. 1 PNPS DAN PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**“.

Tesis ini menggambarkan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia, dan upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama di Indonesia.

Selanjutnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta yang menentukan kebijakan-kebijakan tentang penulisan Tesis.
2. Dekan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta yang mendukung dalam penulisan Tesis.
3. Brigadir Jenderal Polisi Syafril Nursal, S.H., M.H. selaku Kasespimma Polri yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah Pasca Sarjana.
4. DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pada penulisan Tesis ini
5. DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pada penulisan Tesis ini

6. Civitas akademi Ubhara Jaya Bekasi khususnya Pacsa Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam penyusunan Tesis ini.
7. Isteriku yang tercinta dan anak-anaku tersayang yang senantiasa memberikan do'a dan semangatnya, untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan kuliah ini.
8. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum angkatan 15 Universitas Bhayangkara Kampus Bekasi yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penulisan Tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga atas jerih payah dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan Tesis ini kepada Almamater Universitas Bhayangkara Jaya dengan harapan semoga bermanfaat bagi Mahasiswa dan khalayak umum.

Bekasi, Mei 2018

I NyomanTika



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Batasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Tujuan &amp; Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Kerangka Teori</b>	
<b>1.6.1 Teori Kepastian dan Keadilan Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>1.6.2 Tindak Pidana.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6.3 Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>14</b>
<b>1.7 Metode Penulisan</b>	
<b>1.7.1 Spesifikasi Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>1.7.2 Pendekatan.....</b>	<b>16</b>
<b>1.7.3 Bahan Hukum.....</b>	<b>17</b>

<b>1.7.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	18
<b>1.7.5 Tehnik Pengelolaan Bahan Hukum.....</b>	19
<b>1.7.6 Analisis Bahan Hukum.....</b>	20
<b>1.8 Sistematika Penulisan.....</b>	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Teori Kepastian dan Keadilan Hukum.....</b>	23
<b>2.2 Tindak Pidana.....</b>	31
<b>2.3 Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	58
<b>BAB III PEMBAHASAN MASALAH I</b>	
<b>3.1 Kasus-kasus Tindak Pidana Penodaan Agama.....</b>	63
<b>3.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia.....</b>	71
<b>BAB IV UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PENODAAN AGAMA DI INDONESIA....</b>	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>5.1 Simpulan.....</b>	97
<b>5.2 Saran.....</b>	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	